



Desentralisasi Fiskal Wujudkan Pengelolaan Negara yang Lebih Optimal

Jakarta, 24 September 2024 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Internasional dengan mengambil tema “*Optimizing Fiscal Decentralization for Pathway to Promote Growth, Wellbeing and Convergence*”. Tema ini selaras dengan tema kebijakan fiskal nasional tahun 2025 yaitu “akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif” yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, *wellbeing*, dan konvergensi antardaerah. Seminar Internasional tahun kedua ini bekerjasama dengan World Bank dan menghadirkan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI (Menkeu), Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Indermitt Gill, Chief Economist/Senior Vice President World Bank, serta narasumber internasional lainnya. Salah satu tujuannya untuk memaparkan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia kepada khalayak internasional juga sebagai forum untuk mendapat masukan dari berbagai ahli internasional.

Desentralisasi merupakan isu yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia. Oleh karenanya, perbaikan kinerja desentralisasi dan otonomi daerah adalah suatu keniscayaan, *It is a must for us to continue improving, and also our responsibility* ujar Menkeu di acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (24/9).

Dalam seminar tersebut, pemerintah juga menyerahkan penghargaan Insentif Fiskal kepada daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tahun berjalan, yaitu perwakilan masing-masing 7 Daerah Terbaik pada Kategori Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kategori Percepatan Belanja Daerah yang mewakili 130 daerah penerima Insentif Fiskal masing-masing kategori tersebut. Selain penghargaan Insentif Fiskal kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, juga akan diberikan penghargaan Insentif Desa kepada desa yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kategori kinerja keuangan dan pembangunan desa, kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

Menkeu juga menyampaikan Pemerintah memberikan reward bagi daerah yang perform, inilah yang kita sebutkan melalui insentif fiskal dari beberapa indikator. Hari ini award bagi kriteria daerah yang menggunakan APBDnya untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan melakukan percepatan belanja daerah agar ekonominya bergerak. Selain itu, ada juga Desa yang tadi disampaikan yang melakukan perbaikan dari sisi kinerja dan pelaporan. Saya termasuk yang sangat senang karena sekarang jumlah Desa Mandiri lebih dari 20.000 desa, jadi sudah 1/3 dari desa-desa kita itu sudah mandiri dengan Dana Desa yang sudah kita berikan selama 10 tahun ini.

Seminar internasional ini merupakan kegiatan puncak yang telah didahului kegiatan *preheating* seminar berupa *Focus Group Discussion* Strategi Penguatan Kebijakan Fiskal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Seminar Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Daerah, dan *High Level Policy Dialogue*.

Dengan adanya *sharing session* dari berbagai ahli dan praktisi dari mancanegara tersebut, diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan fiskal yang tepat dalam mengoptimalkan praktek desentralisasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, *wellbeing*, dan konvergensi antardaerah di Indonesia.

Narahubung Media:

Ricka Yunita Prasetya
Kepala Subbagian Strakom dan Layanan Informasi Publik
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

☎ 021 1500 420
✉ humas.djpk@kemenkeu.go.id